



MAKNA TANAH SAKRAL DALAM PERSPEKTIF TRI HITA KARANA: SEBUAH STUDI KOMUNIKASI BUDAYA

I Made Dwi Gunarta ^{a,1}

^aBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem

¹ Corresponding Author, email: dwigunarta7@gmail.com (Gunarta)

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 14-09-2025

Revised: 24-09-2025

Accepted: 19-10-2025

Published: 30-10-2025

Keywords:

Sacred Land,
Tri Hita Karana,
Cultural
Communication,
Spatial
Sacredness
Spiritual Ecology

ABSTRACT

In Balinese culture, land is not merely perceived as a physical space but as a living entity that embodies spiritual, social, and ecological dimensions. For Hindu Balinese communities, land represents *pancer jagat*, a cosmological center that links humans with nature and the divine. This study aims to explore the meaning of sacred land through the lens of *Tri Hita Karana*, a philosophical framework that emphasizes harmony between humans and God (*parhyangan*), humans and other humans (*pawongan*), and humans and the natural environment (*palemahan*). Employing an interpretive qualitative approach within a cultural communication paradigm, data were gathered through in-depth interviews with customary leaders and spiritual practitioners, as well as observations at sites considered sacred, including *pura kahyangan jagat*, cremation grounds, and family courtyards (*natah*). A symbolic-hermeneutic analysis was applied to interpret signs, rituals, and communicative practices that construct the sacrality of land in everyday life. The findings reveal that sacred land functions as a spiritual mediator between humans and cosmic forces, while simultaneously serving as an ecological communication space that reinforces collective responsibility to maintain environmental balance. Rituals such as *piodalan*, land purification ceremonies, and the spatial arrangement of sacred courtyards demonstrate how the values of *Tri Hita Karana* are embodied and transmitted. Thus, the meaning of sacred land reflects not only religious belief but also a cultural communication system that sustains spiritual, social, and ecological harmony in Balinese life.

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Hindu Bali, tanah tidak sekadar dimaknai sebagai unsur material atau sumber ekonomi, melainkan sebagai entitas spiritual yang hidup dan bernilai sakral. Dalam pandangan kosmologis Bali, tanah merupakan ibu pertiwi unsur dasar kehidupan yang menjadi wadah bagi lahirnya manusia, tumbuhnya tanaman, serta berdirinya tempat suci. Relasi manusia dengan tanah tidak bersifat profan, tetapi spiritual; di dalamnya terkandung ikatan kosmis antara manusia (*pawongan*), alam (*palemahan*), dan Tuhan (*parhyangan*). Falsafah *Tri Hita Karana* menjadi landasan utama bagi pemaknaan tersebut. *Tri Hita Karana* bukan hanya konsep etis, melainkan sistem komunikasi ekologis dan spiritual yang menuntun manusia untuk menjaga keseimbangan antara dimensi transenden, sosial, dan alamiah (Windia & Dewi, 2011). Dalam konteks ini, tanah bukan hanya tempat berpijak, tetapi juga media komunikasi antara manusia dan semesta ruang di mana doa, sesajen, dan ritual berlangsung sebagai bentuk dialog simbolik dengan kekuatan kosmis. Namun, di tengah arus modernisasi dan ekspansi ekonomi global, kesakralan tanah Bali mengalami pergeseran makna. Tanah yang dahulu dijaga sebagai ruang suci kini sering menjadi objek komodifikasi melalui pembangunan pariwisata, pemukiman, dan

industri properti. Pergeseran ini menimbulkan ketegangan antara nilai spiritual dan nilai ekonomis. Tanah yang semula menjadi lambang harmoni kini sering menjadi sumber konflik sosial dan ekologis, terutama ketika tempat suci, sawah, atau pekarangan keluarga dijual atau dialihfungsikan. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis makna budaya terhadap tanah, yang mencerminkan perubahan cara masyarakat berkomunikasi dengan alam dan dengan sakralitas itu sendiri.

Dari perspektif komunikasi budaya, tanah sakral dapat dipahami sebagai tanda simbolik yang menyalurkan pesan-pesan religius dan ekologis melalui berbagai bentuk praktik sosial dan ritual. Upacara seperti piodalan, metatah, ngaben, atau melaspas selalu melibatkan penghormatan terhadap tanah sebagai unsur dasar penyucian. Dalam setiap upacara tersebut, manusia tidak hanya berkomunikasi dengan sesama, tetapi juga dengan unsur alam dan kekuatan ilahi yang diyakini bersemayam di dalam tanah. Dengan demikian, komunikasi budaya di Bali tidak hanya bersifat verbal atau sosial, melainkan juga ritualistik dan ekologis, di mana simbol dan tindakan menjadi media penyampai nilai kesucian. Kajian mengenai makna tanah sakral dalam perspektif Tri Hita Karana menjadi penting karena mampu mengungkap bagaimana nilai-nilai budaya lokal berfungsi sebagai sistem komunikasi dan ekologi spiritual yang menjaga harmoni kehidupan. Penelitian ini tidak hanya berupaya memahami makna tanah secara religius, tetapi juga ingin menelusuri bagaimana kesadaran kesakralan tersebut diartikulasikan, dikomunikasikan, dan dipertahankan oleh masyarakat Bali di tengah perubahan sosial yang cepat. Melalui pendekatan komunikasi budaya, penelitian ini memandang tanah sakral sebagai teks simbolik yang menyimpan pesan moral dan spiritual. Simbol-simbol seperti pura keluarga, natah rumah, setra (kuburan), dan pelinggih bukan hanya artefak keagamaan, tetapi juga ruang komunikasi transenden tempat manusia berinteraksi dengan alam semesta. Oleh karena itu, memahami makna tanah sakral dalam bingkai Tri Hita Karana berarti juga memahami cara masyarakat Bali menafsirkan dunia, menjaga harmoni, dan mengelola keberlanjutan kehidupan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan paradigma komunikasi budaya. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur atau menguji variabel, melainkan untuk memahami makna simbolik dan spiritual dari tanah sakral dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali. Pendekatan ini memandang kebudayaan sebagai sistem tanda dan praktik komunikasi yang membentuk cara manusia berinteraksi dengan dunia dan dengan yang transenden (Geertz, 1973; Littlejohn & Foss, 2018). Metode penelitian ini dirancang untuk mengungkap makna simbolik tanah sakral sebagai ruang komunikasi spiritual dalam kehidupan masyarakat Bali. Hal ini senada juga seperti yang diungkap Budiasa (2016) bahwa Etnografi baru menempatkan makna budaya sebagai hasil interaksi simbolik yang hidup dalam pengalaman sehari-hari, sedangkan etnografi kritis mengajak peneliti lebih peka terhadap relasi kuasa, ideologi, dan perubahan sosial yang memengaruhi pemaknaan tanah sakral di Bali. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian dapat melihat tanah sakral tidak hanya sebagai simbol spiritual, tetapi juga sebagai ruang yang terus dinegosiasikan maknanya di tengah arus modernisasi dan dinamika budaya masyarakat Bali. Melalui pendekatan etnografi dan analisis hermeneutik, penelitian ini berupaya menyingkap bagaimana nilai-nilai *Tri Hita Karana* tidak hanya diajarkan, tetapi juga dikomunikasikan dan dihidupi melalui praktik keseharian yang menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah sebagai Simbol Kosmis dalam Kebudayaan Bali

Dalam pandangan kosmologi Hindu Bali, tanah merupakan unsur dasar penciptaan (Panca Mahabhuta) dan menjadi representasi dari prithivi tattwa unsur bumi yang menopang kehidupan. Tanah dipahami bukan sekadar benda mati, tetapi entitas hidup yang memiliki daya spiritual. Oleh sebab itu, setiap aktivitas yang menyentuh tanah seperti membangun rumah, bercocok tanam, atau mendirikan pura selalu diawali dengan ritual *mecaru* atau *melaspas* sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan kekuatan yang bersemayam di dalamnya. Tanah, dalam konteks ini, menjadi medium komunikasi antara manusia, alam, dan Tuhan. Ia adalah ruang dialog spiritual di mana

doa, sesajen, dan tindakan manusia mencerminkan penghormatan terhadap alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa konsep sakralitas tanah bukan hanya bersifat religius, melainkan juga ekologis dan etis. Dalam budaya Bali, menjaga kesucian tanah berarti menjaga keseimbangan kosmos sebuah tanggung jawab spiritual yang berakar pada filosofi *Tri Hita Karana*.

Perspektif Tri Hita Karana: Struktur Harmoni dalam Sakralitas Tanah

Falsafah *Tri Hita Karana* mengajarkan tiga relasi utama yang membentuk harmoni kehidupan: (1) Parhyangan : hubungan manusia dengan Tuhan, (2) Pawongan : hubungan manusia dengan sesama, dan Palemahan : hubungan manusia dengan alam, (3) Ketiga dimensi ini membentuk komunikasi kosmis yang saling terkait, di mana tanah menjadi titik temu dari ketiganya.

- a. Dalam aspek Parhyangan, tanah dianggap sebagai tempat manifestasi Tuhan (*sthana Ida Sang Hyang Widhi*). Setiap pura berdiri di atas tanah yang disucikan, dan arah serta letaknya disesuaikan dengan struktur kosmologis *mandala*. Prosesi *mendak tanah* sebelum pembangunan menunjukkan bagaimana masyarakat “berkomunikasi” dengan bumi untuk memohon izin spiritual.
- b. Dalam aspek Pawongan, tanah menjadi ruang sosial di mana manusia membangun interaksi melalui pekarangan keluarga (*natah*), balai banjar, dan sawah yang digarap bersama. Kesadaran kolektif terhadap batas tanah adat (*tanah ayahan desa*) memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial.
- c. Dalam aspek Palemahan, tanah diperlakukan sebagai tubuh bumi yang harus dijaga kesuburannya. Praktik *subak* dan ritual *tumpek wariga* mencerminkan komunikasi ekologis manusia terhadap alam bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai penjaga (*pengemong*).

Dalam konteks *palemahan*, tanah menjadi pusat keseimbangan ekologis yang menghubungkan manusia dengan lingkungan hidupnya. Kesadaran terhadap tanah sebagai unsur sakral menuntun masyarakat Bali untuk berkomunikasi dengan alam melalui tindakan ritual dan etika keseharian.. Misalnya, dalam upacara *tumpek wariga* dan *tumpek kandang*, manusia berterima kasih kepada alam dan makhluk hidup sebagai bentuk penghormatan terhadap keseimbangan kosmis (Putra & Astiti, 2019). Tanah bukan sekadar sumber daya, tetapi simbol komunikasi spiritual yang memperkuat relasi manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Tri Hita Karana menjadi kode etik budaya yang menuntun masyarakat Bali untuk menjaga keseimbangan hidup melalui praktik simbolik yang berakar pada kesadaran ekologis (Sirtha, 2008). Dengan demikian, tanah sakral dalam Tri Hita Karana bukan hanya simbol religius, tetapi tanda komunikasi yang menghubungkan tiga tataran eksistensi kehidupan: spiritual, sosial, dan ekologis. Falsafah Tri Hita Karana menjadi dasar konseptual utama untuk memahami relasi manusia dengan tanah sakral. Tri Hita Karana terdiri dari tiga prinsip keseimbangan: *parhyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan manusia dengan sesama), dan *palemahan* (hubungan manusia dengan alam) (Surata, 2007). Penjelasan teoretis mengenai struktur harmoni ini mengonfirmasi hasil wawancara dengan salah satu tokoh ada setempat, yang menegaskan bahwa batas-batas tanah adat (*tanah ayahan desa*) bukan sekadar pembagian administratif wilayah, melainkan garis kosmis yang mengikat tanggung jawab spiritual warga desa (*krama*). Menurut penuturan tokoh ini, setiap jengkal tanah yang diperuntukkan bagi *parhyangan* dan *palemahan* memiliki taksu yang harus dijaga melalui ritual penyucian berkala; ketika terjadi pergeseran fungsi tanah tanpa persetujuan adat, hal itu diyakini akan merusak komunikasi spiritual antara krama desa dengan kekuatan leluhur serta memicu ketidakseimbangan sosial.

Komunikasi Budaya dan Simbolisme Kesakralan Tanah

Dari perspektif komunikasi budaya, setiap tindakan manusia terhadap tanah adalah tindakan

komunikatif yang sarat simbol. Upacara *piodalan*, *melaspas*, *ngenteg linggih*, hingga *ngaben* selalu melibatkan tanah sebagai unsur penting. Melalui ritual tersebut, manusia mengirimkan pesan penghormatan dan keseimbangan kepada kekuatan alam dan leluhur. Misalnya, dalam ritual *mecaru*, persembahan ditanam atau diletakkan di atas tanah untuk menyeimbangkan unsur negatif (*bhuta kala*). Proses ini adalah bentuk komunikasi simbolik nonverbal yang merepresentasikan pesan etis: manusia tidak boleh mendominasi alam, melainkan harus hidup berdampingan. Bahasa tubuh dalam ritual menyentuh tanah, menabur beras, atau menanam sesajen menjadi bentuk ekspresi spiritual yang menunjukkan kesadaran akan keberadaan energi suci (*prana*) dalam bumi. Dalam kerangka semiotik, tanah di sini berfungsi sebagai signifier (penanda) dari harmoni kosmis dan kesucian hidup (Hall, 1997). Ritual-ritual ini juga berperan sebagai komunikasi transgenerasional. Melalui pewarisan lisan dan tindakan simbolik, nilai kesakralan tanah diturunkan dari generasi ke generasi. Anak-anak belajar menghormati tanah bukan melalui doktrin, melainkan melalui tindakan ritual yang diulang setiap hari membuat *canang sari*, menyapu pekarangan, atau memercikkan *tirta* ke bumi.

Keterlibatan tanah sebagai medium komunikasi transenden ini diamini oleh salah seorang pemangku yang diwawancarai dalam penelitian ini. Beliau menjelaskan bahwa prosesi menanam persembahan (*caru*) atau memercikkan *tirta* ke bumi bukanlah tindakan simbolik yang bersifat pasif, melainkan bentuk dialog spiritual dua arah antara manusia dan unsur *Prithivi Tattwa*. Dalam pandangan praktisi spiritual tersebut, tanah bertindak sebagai penerima pesan (*receiver*) dari doa-doa manusia yang kemudian mentransformasikan energi negatif (*bhuta*) menjadi energi positif (*dewa*) demi menjaga keselamatan lingkungan fisik dan batiniah masyarakat. Dalam pandangan masyarakat Hindu Bali, tanah dipahami tidak hanya sebagai unsur material, tetapi sebagai entitas spiritual yang hidup dan memiliki daya kesucian (*prithivi tattwa*). Tanah menjadi bagian dari *Panca Mahabhuta* atau lima unsur pembentuk alam semesta yang meliputi tanah, air, api, udara, dan ether (Titib, 2003). Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia yang melibatkan tanah, seperti membangun rumah atau mendirikan tempat suci, selalu diawali dengan ritual penyucian seperti *mecaru* dan *melaspas*. Ritual ini bukan sekadar bentuk penghormatan, tetapi juga komunikasi simbolik antara manusia dan alam semesta (Covarrubias, 2015). Tanah dalam kebudayaan Bali berfungsi sebagai media komunikasi religius, di mana manusia menghubungkan dirinya dengan energi ilahi dan kekuatan kosmos. Melalui tindakan ritual dan simbolik, manusia menyampaikan pesan tentang penghormatan dan keseimbangan. Dengan demikian, kesakralan tanah tidak hanya bersifat religius, tetapi juga mengandung makna komunikatif dan ekologis yang menegaskan harmoni antara manusia dan alam (Windia & Dewi, 2011).

Pergeseran Makna: Dari Sakral ke Profan

Modernisasi, pariwisata, dan urbanisasi telah membawa dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap tanah. Di banyak wilayah Bali, tanah kini lebih sering dipandang sebagai aset ekonomi daripada simbol spiritual. Tanah dijual, digadaikan, atau dialihfungsikan untuk vila dan hotel, tanpa mempertimbangkan nilai sakral yang melekat di dalamnya. Pergeseran makna ini menimbulkan apa yang disebut sebagai dislokasi nilai budaya (Laclau & Mouffe, 1985), yaitu ketika simbol-simbol lama (tanah sakral) kehilangan stabilitas makna akibat intervensi wacana ekonomi dan globalisasi. Realitas pergeseran makna ini terefleksi dari hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Karangasem, yang mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya pengalihan kepemilikan tanah pekarangan (*natah*) dan lahan pertanian demi kepentingan ekonomi sesaat. Tokoh tersebut menyatakan bahwa meskipun dorongan kebutuhan finansial di era modern sangat kuat, sebagian besar masyarakat adat sebenarnya mengalami dilema moral dan spiritual saat melepaskan tanah warisan leluhur. Keterangan ini memperlihatkan adanya negosiasi wacana yang rumit di tingkat tapak, di mana kesadaran akan kesakralan tanah berbenturan langsung dengan tekanan arus komersialisasi properti dan pariwisata.

Masyarakat Bali kini hidup di antara dua logika: logika adat dan logika kapital. Dalam konteks

ini, komunikasi budaya berperan penting untuk menegosiasikan makna baru yang tetap berpijak pada spiritualitas lokal. Seiring berkembangnya pariwisata dan modernisasi, terjadi pergeseran makna tanah dari simbol sakral menjadi komoditas ekonomi. Tanah tidak lagi dipandang sebagai ruang spiritual, melainkan aset finansial yang dapat diperjualbelikan. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut Laclau dan Mouffe (1985) sebagai *dislokasi makna* yakni perubahan makna akibat benturan wacana modern dan tradisional. Bali kini menghadapi tantangan di mana pembangunan hotel, vila, dan tempat wisata sering mengorbankan tanah yang dulunya dianggap sakral (Cole, 2012). Pergeseran ini memperlihatkan krisis komunikasi budaya, ketika nilai-nilai spiritual tidak lagi dikomunikasikan secara efektif kepada generasi muda. Akibatnya, makna tanah sebagai ruang sakral mulai digantikan oleh makna profan yang berbasis konsumsi dan ekonomi (Picard, 1996). Namun demikian, beberapa komunitas adat di Bali mulai melakukan resistensi budaya dengan memperkuat peraturan adat (*awig-awig*), menolak penjualan tanah suci, serta mengedukasi generasi muda mengenai nilai-nilai Tri Hita Karana. Upaya ini merupakan bentuk komunikasi intergenerasional, di mana pesan moral dan ekologis diwariskan secara kolektif melalui upacara, pendidikan informal, dan kegiatan spiritual (Ardika, 2015). Beberapa desa adat berusaha mengembalikan keseimbangan ini dengan membatasi penjualan tanah adat, mendirikan *awig-awig* (aturan adat), dan menguatkan pendidikan spiritual berbasis Tri Hita Karana. Upaya ini menunjukkan bagaimana komunikasi budaya berfungsi sebagai mekanisme resistensi terhadap komodifikasi nilai sakral.

Tanah Sakral sebagai Ruang Komunikasi Ekologis

Dalam konteks ekologi spiritual, tanah sakral berperan sebagai ruang komunikasi ekologis (eco-communication) antara manusia dan lingkungan. Setiap tindakan yang merusak tanah dianggap sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan alam. Masyarakat Bali memiliki kesadaran bahwa bencana seperti tanah longsor, kekeringan, atau gagal panen bukan semata gejala alam, melainkan pesan simbolik dari bumi yang kehilangan kesuciannya akibat perilaku manusia. Makna tanah sakral juga dapat dipahami dalam konteks komunikasi ekologis (eco-communication), yakni proses di mana manusia berinteraksi dan bernegosiasi dengan lingkungan melalui simbol dan tindakan budaya. Dalam tradisi Bali, tanah diperlakukan sebagai *ibu pertiwi* yang memiliki roh dan kesadaran spiritual (Astuti, 2020). Ketika tanah rusak, masyarakat percaya bahwa itu merupakan pesan simbolik dari alam yang menunjukkan ketidakseimbangan spiritual. Oleh karena itu, ritual penyucian seperti *butha yadnya* dilakukan untuk memulihkan komunikasi yang terganggu antara manusia dan alam. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi budaya di Bali tidak hanya berlangsung antarindividu, tetapi juga melibatkan entitas non manusia seperti tanah, tumbuhan, dan roh penjaga alam (Eiseman, 1990). Dengan demikian, tanah sakral berfungsi sebagai jembatan spiritual antara manusia dan semesta, yang terus dipelihara melalui sistem komunikasi simbolik dan nilai-nilai Tri Hita Karana. Pemaknaan ini memperlihatkan bahwa komunikasi budaya tidak hanya menyampaikan pesan sosial, tetapi juga pesan moral dan ekologis tentang pentingnya harmoni hidup. Nilai-nilai *Tri Hita Karana* menjadi kerangka etis untuk membangun kembali komunikasi harmonis dengan bumi. Melalui ritual *tumpek kandang* dan *tumpek wariga*, masyarakat diingatkan untuk berterima kasih kepada hewan, tumbuhan, dan tanah sebagai bagian dari kehidupan spiritual. Dengan demikian, tanah tidak hanya berfungsi sebagai ruang material, tetapi juga medium pesan moral dan spiritual yang mengajarkan keseimbangan ekologis.

Kehadiran dimensi partisipatif ini mempertegas bahwa kesakralan tanah tidak lagi hanya menjadi tradisi yang diwariskan secara pasif (*inherited tradition*), melainkan telah bertransformasi menjadi kerangka resistensi budaya (*cultural resistance*) yang progresif. Dalam konteks aksi-aksi lingkungan di Bali, seperti gerakan penolakan alih fungsi kawasan suci pesisir dan pembelaan tanah ayahan desa. Narasi *Tri Hita Karana* diartikulasikan kembali sebagai instrumen komunikasi politik-ekologis untuk melawan diskursus pembangunan yang kapitalistik. Integrasi antara nilai transenden *parhyangan*, kedaulatan komunitas adat *pawongan*,

dan perlindungan ekologis *palemahan* membuktikan bahwa spiritualitas lokal mampu menjadi benteng pertahanan ruang hidup. Dengan demikian, dinamika komunikasi budaya modern di Bali berhasil menjembatani kearifan kosmologis masa lalu dengan tuntutan keadilan lingkungan global (*environmental justice*), menjadikan makna tanah sakral relevan tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga sebagai model komparatif bagi kajian ekologi budaya di tingkat internasional

Makna Komunikatif Tanah Sakral dalam Kehidupan Kontemporer

Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun modernisasi memengaruhi bentuk praktik, makna spiritual tanah tetap bertahan dalam kesadaran kolektif masyarakat Bali. Kesakralan tanah kini juga diartikulasikan melalui upaya pelestarian lingkungan, pembangunan pura baru, dan kampanye ekowisata berbasis spiritualitas. Meskipun modernisasi telah membawa perubahan besar, kesadaran masyarakat Bali terhadap nilai tanah sakral tetap bertahan melalui ritual, seni, dan pendidikan budaya. Kesakralan tanah kini juga direpresentasikan melalui gerakan pelestarian lingkungan berbasis spiritualitas, seperti *eco-temple*, konservasi subak, dan pendidikan Tri Hita Karana di sekolah (Suardana, 2018). Nilai-nilai yang terkandung dalam pemaknaan tanah sakral memberikan kontribusi penting bagi wacana komunikasi budaya kontemporer: bahwa hubungan manusia dengan alam bukan hanya relasi eksploitasi, tetapi dialog simbolik yang membutuhkan keseimbangan. Dengan demikian, pemahaman terhadap tanah sakral tidak hanya relevan bagi konteks Bali, tetapi juga bagi pembangunan etika ekologis global yang berkeadaban spiritual. Dalam konteks komunikasi budaya, tanah sakral menjadi metafora identitas Bali sebuah tanda yang mengikat hubungan manusia dengan leluhur dan alam. Kesadaran ini tercermin dalam pepatah Bali "*Bhuana alit manut ring bhuana agung*" (dunia kecil mengikuti dunia besar), yang berarti manusia harus selaras dengan semesta. Dengan demikian, tanah bukan hanya objek yang dikaji secara fisik, melainkan pesan simbolik tentang kehidupan harmonis. Melalui praktik ritual dan nilai Tri Hita Karana, masyarakat Bali terus mengomunikasikan ajaran bahwa keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan merupakan dasar keberlanjutan budaya dan spiritualitas Bali. Dalam kehidupan kontemporer masyarakat Bali, makna tanah sakral tidak lagi semata-mata berkaitan dengan ritual keagamaan, tetapi juga dengan identitas, resistensi budaya, dan komunikasi ekologis. Tanah menjadi simbol yang terus direproduksi melalui berbagai bentuk representasi sosial dan budaya, seperti upacara adat, tata ruang desa pakraman, bahkan media digital yang menampilkan kesadaran ekologis dan spiritualitas Bali.

Menurut Hall (1997), makna budaya tidak bersifat tetap, melainkan hasil dari proses representasi dan negosiasi sosial. Artinya, makna kesakralan tanah di Bali juga mengalami perubahan sesuai dengan konteks zaman, namun tetap mempertahankan inti spiritualnya. Dalam konteks ini, masyarakat Bali secara aktif mengkomunikasikan ulang nilai-nilai kesakralan tanah melalui praktik sosial yang baru, seperti pelestarian subak, kampanye lingkungan berbasis Tri Hita Karana, atau revitalisasi upacara yang mengandung pesan ekologis.

a. Tanah Sakral sebagai Identitas Budaya dan Spiritual

Tanah di Bali adalah penanda identitas kolektif (*cultural marker*) yang membedakan masyarakat Bali dengan budaya lain. Kepemilikan dan perlindungan tanah adat tidak hanya menunjukkan hubungan ekonomi, tetapi juga hubungan simbolik dengan leluhur dan Tuhan (Pitana, 1994). Ketika masyarakat menjaga tanah leluhur, sesungguhnya mereka juga menjaga kontinuitas komunikasi spiritual dengan nenek moyang mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Ardika (2015), ruang sakral seperti *pura desa*, *setra* (kuburan), atau *natah rumah* bukan hanya tempat, tetapi pusat energi budaya tempat nilai dan tradisi diwariskan lintas generasi. Di era modern, fungsi ini tetap dijaga melalui upacara, pendidikan keluarga, dan ajaran agama yang menekankan pentingnya menghormati tanah sebagai bagian dari diri manusia. Kesadaran ini menegaskan bahwa tanah bukan sekadar *benda fisik*, tetapi media komunikasi spiritual yang

menghubungkan manusia dengan masa lalu dan masa depan. Dalam istilah Geertz (1973), hal ini mencerminkan bentuk "*deep play*" ketika tindakan ritual yang tampak sederhana (seperti menabur bunga atau menyentuh tanah sebelum sembahyang) memiliki makna simbolik yang dalam tentang keterikatan manusia dengan kosmos.

b. Tanah Sakral sebagai Arena Negosiasi Makna

Perubahan sosial yang cepat di Bali akibat globalisasi dan pariwisata menimbulkan ketegangan makna antara nilai tradisional dan nilai modern. Di satu sisi, tanah diperlakukan sebagai ruang ekonomi; di sisi lain, ia tetap dipandang sebagai ruang sakral. Ketegangan ini menciptakan ruang negosiasi simbolik, di mana masyarakat Bali harus menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan komitmen spiritual (Cole, 2012). Misalnya, beberapa desa adat kini memanfaatkan tanah adat untuk kegiatan pariwisata spiritual, seperti *eco-temple tour* atau *spiritual retreat*, yang menggabungkan nilai ekonomi dengan nilai sakralitas. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat berupaya mengkomunikasikan ulang makna tanah sakral agar tetap relevan dalam sistem ekonomi modern, tanpa kehilangan esensi religiusnya (Suardana, 2018). Negosiasi makna ini merupakan bagian dari dinamika komunikasi budaya yang digambarkan oleh Laclau dan Mouffe (1985) sebagai *artikulasi wacana* proses di mana makna-makna lama direstrukturisasi dalam konteks baru. Dengan kata lain, masyarakat Bali tidak kehilangan nilai sakralnya, melainkan menyesuaikan simbol dan praktiknya untuk menjawab tantangan zaman.

c. Tanah Sakral dalam Komunikasi Ekologis Modern

Dalam konteks global yang diwarnai krisis lingkungan, nilai tanah sakral mendapat relevansi ekologis baru. Prinsip *Tri Hita Karana* kini diadopsi sebagai landasan filosofi pembangunan berkelanjutan, baik oleh pemerintah maupun lembaga internasional (Windia & Dewi, 2011). Komunikasi budaya tentang tanah sakral kini tidak hanya berlangsung dalam ritual, tetapi juga dalam kampanye publik, pendidikan formal, dan media sosial. Misalnya, generasi muda Bali menggunakan platform digital untuk membagikan pesan spiritual tentang pentingnya menjaga alam dan menghormati tanah sebagai warisan suci (*tanah leluhur*). Dengan demikian, makna kesakralan tanah bertransformasi menjadi narasi ekologis global yang menghubungkan spiritualitas lokal dengan kesadaran planet (Astuti, 2020). Tanah dalam konteks kontemporer juga menjadi simbol perlawanan terhadap eksploitasi lingkungan, terutama ketika masyarakat adat menolak alih fungsi tanah suci menjadi kawasan industri atau wisata. Sikap ini menunjukkan bahwa komunikasi budaya di Bali tidak pasif, tetapi bersifat kritis dan reflektif menegaskan hak spiritual atas ruang hidup.

d. Kesenambungan dan Transformasi Makna

Makna komunikatif tanah sakral dalam kehidupan kontemporer menunjukkan adanya kesinambungan dan transformasi simbolik. Kesenambungan terlihat dari keberlanjutan nilai-nilai *Tri Hita Karana* yang tetap dihidupi melalui praktik ritual dan tradisi sehari-hari. Sedangkan transformasi tampak dalam cara masyarakat menafsirkan ulang simbol-simbol tersebut ke dalam konteks modern, misalnya melalui pembangunan ramah lingkungan, festival budaya, atau pendidikan spiritual berbasis alam (Suardana, 2018; Astuti, 2020). Dalam perspektif komunikasi budaya, fenomena ini memperlihatkan bahwa makna tidak statis, melainkan hasil dari proses dialog sosial yang berkelanjutan. Kesakralan tanah di Bali bertahan bukan karena tradisi yang beku, tetapi karena kemampuan masyarakat untuk menegosiasikan, menafsirkan ulang, dan mengkomunikasikan makna sakralitas sesuai dengan perubahan zaman.

Secara keseluruhan, makna komunikatif tanah sakral dalam kehidupan kontemporer Bali memperlihatkan tiga hal penting:

1. Reartikulasi identitas budaya tanah sebagai simbol spiritual dan identitas kolektif yang menghubungkan manusia dengan leluhur.

2. Negosiasi makna simbolik adaptasi nilai sakral terhadap modernitas tanpa kehilangan esensinya.
3. Ekspansi komunikasi ekologis kesadaran sakralitas tanah sebagai bagian dari narasi global tentang keberlanjutan dan keseimbangan alam.

Ketiga dimensi di atas mengonfirmasi bahwa kesakralan tanah Bali dalam kerangka *Tri Hita Karana* tidak lagi beroperasi secara terisolasi dalam ruang ritual domestik semata, melainkan telah bertransformasi menjadi wacana publik yang dinamis. Data lapangan melalui wawancara dengan tokoh adat dan pemangku menunjukkan bahwa proses reartikulasi identitas dan negosiasi makna tersebut secara konkret mewujudkan dalam revitalisasi aturan adat (*awig-awig*), pelestarian ruang natah dan pura, serta pemanfaatan platform digital oleh generasi muda untuk menyuarakan pesan-pesan ekologis berbasis kearifan lokal. Melalui dialektika ini, masyarakat Bali terbukti tidak sekadar pasif menghadapi penetrasi komersialisasi dan modernisasi pariwisata, melainkan secara aktif melakukan resemantisasi terhadap simbol-simbol kesucian tanah.

Secara keseluruhan, tanah sakral bertransformasi menjadi medium komunikasi budaya yang sangat adaptif. Hal ini mampu menjembatani nilai transenden *parhyangan*, keterikatan sosial *pawongan*, serta pelestarian lingkungan *palemahan* di tengah derasnya arus perubahan zaman. Dialektika ini membuktikan bahwa tanah suci Bali bukan hanya terikat pada sistem kepercayaan lokal semata, melainkan hadir sebagai bahasa komunikasi yang mengekspresikan relasi harmonis antara manusia, alam, dan spiritualitas secara berkelanjutan di era modernisasi global.

Gambar 1 Bentang Tanah Sakral Pura Uluwatu



Sumber: Sumber: wikipedia.org (2025)

https://id.wikipedia.org/wiki/Pura_Luhur_Uluwatu#/media/Berkas:PuraLuhurUluWatu_view.jpg

Foto Pura Uluwatu yang berdiri megah di atas tebing tinggi di ujung barat daya Pulau Bali menghadirkan simbol yang sangat kuat mengenai relasi spiritual antara manusia, alam, dan Tuhan. Pura ini bukan hanya menjadi objek wisata yang indah, tetapi merupakan ruang sakral yang mengandung pesan filosofis mendalam tentang kesucian tanah dan keseimbangan kosmos sebagaimana diajarkan dalam konsep *Tri Hita Karana*. Dalam *Tri Hita Karana*, harmoni hidup

dicapai melalui tiga hubungan utama: *parhyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan antarsesama manusia), dan *palemahan* (hubungan manusia dengan alam). Pura Uluwatu merepresentasikan ketiga relasi tersebut dalam bentuk fisik dan simbolik. Secara geografis, posisinya di tebing yang menjulang di atas samudra menggambarkan dimensi transenden suatu ruang di mana manusia dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui keagungan alam (Wiana, 2010). Dalam konteks komunikasi budaya, Pura Uluwatu dapat dibaca sebagai tanda komunikasi spiritual. Struktur pura, tata ruang, serta orientasinya terhadap laut dan arah mata angin merupakan sistem simbolik yang menyampaikan pesan religius dan ekologis kepada masyarakat. Foto pura di atas tebing misalnya, menunjukkan bahwa tanah bukan sekadar ruang fisik, melainkan medium komunikasi antara manusia dan kekuatan ilahi. Melalui ritual dan persembahyangan di Pura Uluwatu, masyarakat Hindu Bali memperkuat *parhyangan* mereka dengan Tuhan, sekaligus menjaga *palemahan* melalui penghormatan pada alam (Covarrubias, 2015).

Lebih jauh, tanah di sekitar Pura Uluwatu dianggap sakral karena menjadi batas antara dunia manusia dan dunia ilahi. Tebing yang curam dan lautan luas di bawahnya melambangkan ambang batas eksistensial antara kehidupan dan kekekalan. Dalam pandangan Tri Hita Karana, batas ini tidak harus dilihat sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung spiritual yang memungkinkan terjadinya komunikasi kosmis. Ritual *odalan* dan *ngaturang banten* yang dilakukan di sana menjadi wujud komunikasi simbolik yang menjaga keseimbangan energi antara alam, manusia, dan Tuhan.

Namun, dalam konteks kehidupan kontemporer, foto Pura Uluwatu juga mencerminkan paradoks budaya. Tempat suci yang dahulu hanya diperuntukkan bagi kegiatan spiritual kini juga menjadi ikon pariwisata global, di mana tanah sakral dikomodifikasi sebagai citra eksotisme Bali. Banyak wisatawan yang mengunjungi pura bukan untuk sembahyang, tetapi untuk menyaksikan *sunset* dan *tari kecak*. Fenomena ini menimbulkan ambiguitas antara nilai spiritual dan nilai ekonomi, yang menggambarkan pergeseran makna komunikasi budaya terhadap kesakralan tanah. Dari perspektif Tri Hita Karana, hal ini menunjukkan tantangan etis dan ekologis bagi masyarakat Bali. Ketika tanah suci dijadikan komoditas, makna *palemahan* dan *parhyangan* cenderung tereduksi menjadi nilai estetika dan hiburan. Namun, di sisi lain, eksposur global terhadap Pura Uluwatu juga membuka peluang untuk memperkenalkan nilai-nilai lokal kepada dunia. Dalam konteks komunikasi budaya, hal ini menjadi ruang dialektis antara pelestarian dan komodifikasi, antara sakral dan profan, antara tradisi dan modernitas (Picard, 1996). Dengan demikian, foto Pura Uluwatu bukan hanya dokumentasi visual tentang keindahan arsitektur dan alam Bali, tetapi juga representasi naratif tentang cara masyarakat berkomunikasi dengan tanah sakralnya. Melalui foto itu, publik dapat membaca nilai-nilai Tri Hita Karana kesadaran akan keseimbangan, penghormatan terhadap alam, dan keterhubungan spiritual yang kini diuji oleh perubahan sosial dan ekonomi yang dinamis.

Foto Pura Uluwatu memperlihatkan kompleksitas hubungan antara manusia, tanah, dan Tuhan yang diartikulasikan melalui ruang sakral. Dalam kebudayaan Bali, setiap unsur ruang memiliki makna simbolik yang menyatu dengan sistem nilai religius. Letak Pura Uluwatu di tebing tinggi yang menjorok ke laut selatan bukanlah kebetulan arsitektural, melainkan manifestasi dari filsafat Tri Hita Karana, yang menegaskan keharmonisan antara *parhyangan* (spiritualitas), *pawongan* (hubungan sosial), dan *palemahan* (lingkungan alam). Secara filosofis, tanah tempat Pura Uluwatu berdiri dipandang sebagai titik pertemuan antara kekuatan purusa (maskulin, langit) dan pradana (feminin, bumi). Tebing yang kokoh melambangkan kekuatan stabilitas, sementara lautan di bawahnya mewakili energi dinamis kehidupan. Keduanya adalah simbol keseimbangan kosmos yang menjadi inti dari ajaran Tri Hita Karana. Dalam foto tersebut, hubungan antara tebing, laut, dan pura menghadirkan visualisasi komunikasi kosmis di mana tanah berfungsi sebagai medium penyatu antara manusia dan kekuatan ilahi (Wiana, 2010).

Dalam konteks komunikasi budaya, Pura Uluwatu berperan sebagai teks simbolik yang “berbicara” melalui bentuk arsitektur, orientasi ruang, dan praktik ritualnya. Tanah yang menjadi dasar pura adalah lokus komunikasi simbolik, tempat masyarakat menyalurkan pesan-pesan religius kepada Tuhan melalui ritual *upacara piodalan*, *ngaturang banten*, atau *melasti*. Melalui ritual-ritual itu, manusia tidak hanya melakukan tindakan spiritual, tetapi juga mengaktualisasikan kesadaran ekologis dan sosial sebuah tindakan komunikasi nonverbal yang menegaskan hubungan timbal balik antara manusia dan alam (Covarrubias, 2015). Foto Pura Uluwatu yang memperlihatkan lanskap laut dan langit di latar belakang mengandung pesan visual tentang kesadaran ekologis dan spiritualitas ruang. Dalam pandangan Hindu Bali, tanah tidak dapat dipisahkan dari langit dan air; ketiganya membentuk satu sistem komunikasi

kosmis yang disebut *Bhuana Agung* (alam besar) dan *Bhuana Alit* (alam kecil/manusia). Dengan demikian, tanah sakral berfungsi sebagai perantara yang memungkinkan terjadinya dialog antara dunia material dan dunia spiritual, sebagaimana diartikulasikan dalam konsep *parhyangan* Tri Hita Karana.

Namun, dalam kehidupan modern, makna sakral Pura Uluwatu mengalami transformasi semiotik. Sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di Bali, pura ini kini juga dipandang sebagai objek estetika dan ekonomi. Foto-foto pura tersebar luas di media sosial, brosur pariwisata, dan konten digital, menjadikannya ikon visual dari eksotisme spiritual Bali. Fenomena ini menunjukkan terjadinya komodifikasi tanah sakral, di mana simbol religius diubah menjadi citra budaya yang dikonsumsi secara global (Picard, 1996).

Dalam bingkai komunikasi budaya, komodifikasi ini tidak selalu berarti hilangnya nilai sakral, melainkan pergeseran cara komunikasi antara budaya lokal dan global. Foto Pura Uluwatu yang diambil oleh wisatawan, misalnya, dapat menjadi sarana penyebaran nilai spiritual Bali kepada dunia luar, sekaligus mengundang refleksi tentang keseimbangan antara pelestarian dan eksploitasi. Namun, ketika tanah suci dijadikan objek hiburan dan ekonomi tanpa pemaknaan spiritual yang benar, terjadi gangguan dalam keseimbangan Tri Hita Karana khususnya dalam relasi *palemahan* (lingkungan) dan *parhyangan* (ketuhanan). Pura Uluwatu menjadi mikrokosmos dari persoalan besar yang dihadapi masyarakat Bali: bagaimana menjaga makna sakral tanah di tengah penetrasi modernitas dan globalisasi? Foto pura di atas tebing seolah mengingatkan bahwa kesucian tanah bukan hanya karena nilai historis atau estetisnya, tetapi karena ia menjadi jembatan spiritual antara manusia dan alam semesta.

Dalam konteks Tri Hita Karana, menjaga kesucian tanah sama dengan menjaga keharmonisan semesta. Ketika tanah sakral seperti Pura Uluwatu dijaga, bukan hanya identitas budaya yang dilindungi, tetapi juga sistem komunikasi ekologis yang menyeimbangkan kehidupan manusia dengan alam dan Tuhan. Karena itu, setiap foto atau representasi visual tentang tanah suci Bali semestinya tidak hanya dilihat sebagai citra keindahan, tetapi sebagai pesan komunikasi budaya yang mengandung nilai etis, spiritual, dan ekologis.

Dengan demikian, foto Pura Uluwatu dapat dipahami sebagai metafora visual dari Tri Hita Karana:

- a. *Parhyangan* terlihat melalui kesakralan pura sebagai tempat pemujaan Tuhan;
- b. *Pawongan* tercermin dalam peran masyarakat yang menjaga dan melaksanakan ritual bersama;
- c. *Palemahan* dihadirkan melalui lanskap alam tebing, laut, dan langit yang menjadi bagian integral dari keberadaan pura itu sendiri.

Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa foto lanskap Pura Uluwatu tidak hanya merepresentasikan keindahan estetika visual, melainkan bertindak sebagai teks komunikasi budaya yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan lingkungan ke dalam satu kesatuan kosmis yang utuh. Hubungan sinergis antara ketiganya memperlihatkan bahwa kesakralan pura (*parhyangan*) tidak dapat dipisahkan dari komitmen kolektif masyarakat adat dalam merawat tradisi (*pawongan*), serta keberadaan lanskap tebing dan samudra (*palemahan*) yang menjadi wadah fisik sekaligus simbolik ruang suci tersebut. Dalam perspektif semiotika budaya, perpaduan elemen-elemen ini menyampaikan pesan komunikatif yang mendalam kepada publik global: bahwa keberlanjutan spiritualitas Bali sangat bergantung pada kemampuan masyarakatnya dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan kepada Yang Maha Kuasa, keharmonisan relasi antarmanusia, dan kelestarian alam lingkungan. Dengan demikian, lanskap sakral ini menegaskan bahwa komunikasi ekologis berbasis *Tri Hita Karana* merupakan bahasa budaya yang terus dihidupi dan ditransmisikan lintas generasi di tengah tantangan modernitas.

SIMPULAN

Kajian mengenai makna tanah sakral dalam perspektif Tri Hita Karana memperlihatkan bahwa tanah bagi masyarakat Hindu Bali bukan sekadar entitas fisik, melainkan ruang komunikasi spiritual dan simbolik yang menghubungkan manusia dengan Tuhan dan alam. Melalui falsafah Tri Hita Karana *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* tanah dimaknai sebagai medium keseimbangan kosmis yang menopang harmoni kehidupan. Dalam kerangka ini,

kesucian tanah tidak hanya diukur dari fungsi religiusnya, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keselarasan antara kehidupan spiritual, sosial, dan ekologis. Temuan pembahasan menunjukkan bahwa tanah sakral seperti yang direpresentasikan dalam Pura Uluwatu merupakan bentuk konkret dari sistem komunikasi budaya masyarakat Bali. Tata ruang, ritual, dan simbol-simbol yang melekat pada pura tersebut menjadi ekspresi komunikasi nonverbal yang menyampaikan nilai kesucian, penghormatan terhadap alam, serta kesadaran akan keterhubungan manusia dengan kekuatan kosmis. Tanah dalam konteks ini menjadi tanda komunikasi transenden tempat berlangsungnya dialog antara manusia dan semesta.

Namun, di tengah arus modernisasi dan pariwisata global, makna tanah sakral mengalami pergeseran simbolik dan komodifikasi budaya. Foto-foto Pura Uluwatu, misalnya, kini banyak dikonsumsi sebagai citra estetis atau ikon wisata, bukan lagi sebagai simbol spiritual. Fenomena ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai lokal Tri Hita Karana menghadapi tantangan dalam mempertahankan makna sakralnya di tengah logika pasar dan konsumsi global. Komodifikasi tanah sakral menimbulkan paradoks komunikasi budaya: di satu sisi memperluas penyebaran simbol Bali secara global, tetapi di sisi lain berisiko mereduksi kedalaman makna spiritual yang melekat pada simbol tersebut.

Dari perspektif komunikasi budaya, tanah sakral tidak hanya perlu dilindungi secara fisik, tetapi juga dipertahankan makna komunikatifnya. Kesadaran terhadap Tri Hita Karana menjadi dasar etis bagi praktik pelestarian budaya dan ekologi. Pemaknaan tanah sebagai ruang sakral perlu terus dikomunikasikan melalui pendidikan budaya, ritual, serta narasi visual yang menghormati nilai kesucian, bukan sekadar mengeksploitasi keindahan. Dengan cara ini, komunikasi budaya dapat berperan sebagai mekanisme transformatif yang menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa memahami tanah sakral dalam perspektif Tri Hita Karana berarti juga memahami cara masyarakat Bali berkomunikasi dengan semesta. Di tengah gempuran modernitas, keberlanjutan nilai-nilai Tri Hita Karana bergantung pada sejauh mana masyarakat mampu menafsirkan kembali makna kesucian tanah sebagai pesan moral dan spiritual yang hidup dalam setiap tindakan, ruang, dan representasi visualnya. Tanah sakral bukan hanya warisan budaya, tetapi bahasa spiritual yang harus terus dipelihara agar keseimbangan kosmis tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I. W. (2015). *Bali: Refleksi dan Transformasi Budaya*. Denpasar: Udayana University Press.
- Astuti, N. P. (2020). *Ritual dan Ekologi Spiritual dalam Tradisi Bali*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Budiasa, I. M. (2016). Paradigma dan teori dalam etnografi baru dan etnografi kritis. Dalam Seminar Nasional Paradigma dan Teori-teori Komunikasi dalam Ilmu Komunikasi (hlm. 9–24). IHDN Press.
- Cole, S. (2012). *Tourism, Culture and Development: Hopes, Dreams and Realities in East Indonesia*. Channel View Publications.
- Covarrubias, M. (2015). *Island of Bali*. Singapore: Periplus Editions.
- Eiseman, F. B. (1990). *Bali: Sekala and Niskala*. Singapore: Periplus Editions.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso.
- Picard, M. (1996). *Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture*. Singapore: Archipelago Press.
- Pitana, I. G. (1994). *Tri Hita Karana: The Balinese Philosophy of Life*. Denpasar: Universitas Udayana Press.

- Putra, I. B. D., & Astiti, N. W. (2019). *Ritual dan Lingkungan dalam Perspektif Tri Hita Karana*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Sirtha, I. N. (2008). *Hukum Adat dan Kearifan Lokal di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Suardana, I. N. (2018). *Tri Hita Karana dalam Pendidikan Lingkungan di Bali*. Denpasar: Widya Dharma Press.
- Surata, I. K. (2007). *Tri Hita Karana: Landasan Filosofis Pembangunan Bali*. Denpasar: Bali Media.
- Titib, I. M. (2003). *Teologi dan Simbol-simbol dalam Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Wiana, I. K. (2010). *Tri Hita Karana: Ajaran Hidup Harmonis dalam Agama Hindu*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Windia, W., & Dewi, R. K. (2011). *Analisis Sistem Subak dalam Kerangka Tri Hita Karana*. Denpasar: Pustaka Larasan.